

Kesadaran demokrasi

Zahrotul Afifah

program studi Perbankan Syari'ah, Universitas Maulana Malik Ibrahim
e-mail: zhraafifah05@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi, Nilai-nilai demokrasi, prinsip dan manfaat demokrasi, Kesadaran demokrasi

Keywords:

Democracy, Democratic values, principles and benefits of democracy, Democratic awareness

A B S T R A K

Tulisan ini membahas kesadaran demokrasi sebagai landasan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan partisipatif. Kesadaran demokrasi mencakup pemahaman dan penghayatan nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan partisipasi. Dalam sistem politik, kesadaran ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga hak dan kewajiban sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran demokrasi dapat memicu melemahnya sistem politik, sedangkan kesadaran yang tinggi mendorong partisipasi, transparansi, dan pengawasan publik.

Pendidikan politik, peran media, serta budaya musyawarah menjadi faktor utama dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, kesadaran demokrasi merupakan pondasi untuk menciptakan tatanan sosial-politik yang stabil, inklusif, dan berkeadilan.

A B S T R A C T

This paper discusses democratic awareness as a crucial foundation for building a just and participatory society. Democratic awareness includes the understanding and internalization of freedom, equality, justice, and participation. In political systems, such awareness requires citizens' active involvement in fulfilling their rights and responsibilities. Low democratic awareness weakens political systems, while strong awareness fosters participation, transparency, and public accountability. Political education, media roles, and the culture of deliberation are key factors in developing democratic awareness in Indonesia. Therefore, democratic awareness serves as a foundation for establishing a stable, inclusive, and just socio-political order.

Pendahuluan

Demokrasi biasanya didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, Dimana setiap orang memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan Keputusan yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas utama dalam demokrasi meliputi kebebasan berpendapat, kesetaraan hak, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang jelas, akuntabel dan mendukung kepentingan Masyarakat. Signifikan demokrasi dalam suatu negara terletak pada kemampuannya untuk menghindari otoritarianisme, menawarkan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, serta menjamin kesejahteraan social melalui kebijakan yang dihasilkan secara partisipatif. Kesadaran demokrasi menunjukkan pada pemahaman, sikap, dan komitmen individu terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan partisipasi dalam politik. Oleh karena itu, kesadaran demokrasi menjadi elemen dasar dalam memastikan keberlangsungan sistem demokrasi, karena melalui pemahaman dan keterlibatan aktif masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan secara efektif. Rendahnya pemahaman tentang demokrasi di kalangan masyarakat bisa menjadi risiko besar bagi kelangsungan sistem demokrasi itu sendiri,



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

karena demokrasi yang kuat memerlukan keterlibatan aktif dan pengawasan dari publik terhadap jalannya pemerintahan. Saat masyarakat kurang menyadari pentingnya berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan, legitimasi demokrasi bisa menurun, memberikan kesempatan bagi praktik-praktik otoriter yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Meningkatkan kesadaran demokrasi membutuhkan usaha yang terencana dan berkelanjutan, salah satunya lewat pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak usia dini. Diharapkan dengan memahami konsep kewarganegaraan, masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran akan demokrasi.

Pembahasan

Konsep Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara umum, demokrasi berarti pemerintahan yang bersumber dari, dilaksanakan oleh, dan ditujukan untuk rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa rakyat memiliki peranan utama dalam menentukan arah pemerintahan serta kebijakan yang diambil oleh negara. Secara terminologis, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan Keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, persamaan hak, keadilan, dan supremasi hukum. Dalam pelaksanaannya, demokrasi diwujudkan melalui pemilu yang jujur dan adil, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta adanya sistem pengawasan terhadap kekuasaan guna tidak mencegah penyalahgunaan wewenang. Berarti rakyat memiliki hak untuk memilih dan mengawasi pemerintah melalui proses pemilihannya yang bersih dan adil. Dalam sistem demokrasi, masyarakat juga bebas untuk menyampaikan pendapat dan cita-cita mereka tanpa rasa takut akan pembatasan. Demokrasi juga melindungi kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demokrasi dapat dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan cara pelaksanaanya dan prinsip yang dianut, antara lain: yang pertama Demokrasi langsung, dalam sistem ini rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan Keputusan tanpa melalui perwakilan. Bentik ini pernah diterapkan di Yunani kuno, di mana warga negara berkumpul untuk membahas dan menentukan kebijakan Bersama. Namun, karena alasan teknis dan efisiensi, sistem ini sulit diterapkan di negara modern yang memiliki populasi besar. Yang ke dua Demokrasi tidak langsung, rakyat menyalurkan hak politiknya dengan memilih wakil-wakil dalam pemilu untuk mewakili mereka dalam proses pemerintahan. Contohnya sistem demokrasi di Indonesia, Dimana Masyarakat memilih anggota legislative dan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan serta menetapkan kebijakan publik. Yang ke tiga Demokrasi liberal, Negara Amerika Serikat dan Inggris menganut bentuk demokrasi ini, yang menekankan pada kebebasan berbicara, kebebasan pers, serta perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas yang ke empat Demokrasi sosial menggabungkan prinsip demokrasi dengan tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak hanya memastikan

kebebasan politik tetapi juga berperan aktif dalam menyediakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warganya, seperti melalui kebijakan layanan sosial, pendidikan, dan jaminan sosial yang merata. Yang ke lima Demokrasi Pancasila, sistem ini diterapkan di Indonesia yang bercirikan pengambilan Keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, serta penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban negara serta keadilan social bagi seluruh rakyat.

Nilai-nilai Demokrasi

nilai-nilai demokrasi adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi sistem demokrasi. Kebebasan adalah salah satu nilai yang sangat penting, karena memungkinkan warga negara untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut akan penindasan atau pembatasan. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, setiap warga negara diharapkan mampu berperan aktif dalam proses politik dan kehidupan sosial. Partisipasi ini memastikan bahwa pemerintah beserta para pejabat publik tetap bertanggung jawab atas kebijakan dan Tindakan yang mereka ambil. Keterlibatan aktif warga negara tersebut menjadi pondasi bagi terwujudnya tatanan Masyarakat yang adil, demokratis dan Sejahtera. Dalam implementasinya, nilai-nilai demokrasi dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk, antara lain partisipasi dalam pemilihan umum, referendum, serta keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai demokrasi akan mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif untuk turut serta dalam Pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi merupakan dasar utama dalam sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat perlindungan hak-hak warga negara. Negara yang berbasis konstitusi menetapkan batas kekuasaan pemerintah dan menjamin kebebasan individu. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang turut serta dalam pengambilan Keputusan politik. Peradilan harus bersifat independent, bebas campur tangan pihak lain. Warga negara memiliki hak untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. Pergantian kekuasaan dilakukan secara teratur guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemilu dilaksanakan secara bebas, adil, dan jujur untuk mejamin legitimasi kepemimpinan. penegakan hukum menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di mata hukum. Demokrasi juga menghargai keberagaman serta menjamin hak asasi manusia. Pers dan media bebas menyampaikan informasi dan aspirasi rakyat. Akuntabilitas pejabat public dan sistem rekrutmen politik yang terbuka penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat.

Manfaat Demokrasi

Demokrasi memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi masyarakat maupun negara, di antaranya menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berbicara, memilih, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik; menegakkan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ataupun latar belakang lainnya; menghasilkan kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan bersama; memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian kebijakan sosial sesuai dengan dinamika

dan tuntutan perkembangan masyarakat; serta menyediakan ruang kebebasan berpendapat yang memungkinkan pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.

Kesadaran Demokrasi

Kesadaran demokrasi merujuk pada pemahaman dan sikap individu maupun kelompok dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana warga negara memahami hak dan kewajiban mereka serta peran aktif dalam sistem demokrasi. Tanpa kesadaran yang kuat, sulit bagi suatu negara untuk membangun pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Bentuk nyata dari kesadaran demokrasi antara lain partisipasi dalam pemilu, keterlibatan dalam diskusi publik, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang sadar demokrasi juga menolak diskriminasi dan lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Kesadaran ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Pendidikan, media, dan lingkungan sosial yang kondusif menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dulu.

Minimnya kesadaran demokrasi berdampak pada rendahnya partisipasi politik, maraknya penyalahgunaan kekuasaan, dan munculnya ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran perlu dilakukan secara terus-menerus melalui pendidikan politik, pemberdayaan media yang objektif, dan transparansi dalam pemerintahan. Semakin tinggi kesadaran demokrasi, semakin besar peluang masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas politik dan mendorong pembangunan yang inklusif. Dalam praktiknya, kesadaran demokrasi dapat ditumbuhkan melalui pendidikan kewarganegaraan, keikutsertaan dalam organisasi sosial, serta diskusi tentang isu-isu publik. Hal ini akan memperkuat peran warga negara dalam proses demokrasi dan memperbesar peluang terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap hak-hak politik memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingannya secara legal dan konstitusional.

Namun, situasi demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan sejumlah tantangan serius. Berdasarkan laporan **Economist Intelligence Unit (EIU)**, Indeks Demokrasi Indonesia menurun dari 6,53 (2023) menjadi 6,44 (2024). Penurunan ini dipengaruhi oleh rendahnya skor budaya politik (5,00) dan kebebasan sipil (5,29). Meskipun pemilu tetap diselenggarakan, kualitas pelaksanaannya dipertanyakan akibat lemahnya partisipasi politik, politisasi institusi, dan dominasi politik dinasti. Keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi semakin menambah kekhawatiran akan praktik nepotisme dan pelemahan demokrasi.

Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Demokrasi di Masyarakat

Kesadaran demokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berimplikasi pada partisipasi politik, kondisi sosial dan ekonomi yang mencerminkan stabilitas kesejahteraan warga, keterbukaan sistem terhadap kompetisi politik dan distribusi kekuasaan yang adil, ketimpangan dalam akses pendidikan, hukum, serta layanan publik yang dapat menghambat implementasi nilai-nilai demokrasi, serta peran pendidikan politik yang

memberikan bekal pemahaman dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokratis.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Demokrasi di kalangan Masyarakat Indonesia

Untuk memperkuat kesadaran demokrasi di Indonesia, sejumlah langkah dapat ditempuh oleh berbagai pihak, di antaranya memberikan pendidikan politik yang merata sejak usia dini melalui kurikulum sekolah dan kampanye publik agar masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara; mendorong keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah dalam setiap kebijakan publik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat; mengaktifkan keterlibatan politik masyarakat melalui partisipasi dalam pemilu, organisasi kemasyarakatan, maupun forum publik termasuk pelibatan generasi muda dan kelompok rentan; menjamin kebebasan media sekaligus meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu mengakses informasi yang objektif dan terhindar dari pengaruh kepentingan tertentu maupun penyebaran berita palsu; serta menumbuhkan dialog dan sikap toleransi melalui ruang-ruang diskusi yang inklusif sehingga semua pihak dapat menyuarakan pandangan dengan aman, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya demokrasi yang partisipatif, harmonis, dan berkualitas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, demokrasi memungkinkan Masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan Keputusan serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap akuntabel dan adil. Namun, keberlangsungan sistem demokrasi sangat bergantung pada Tingkat kesadaran demokrasi Masyarakat. Kesadaran demokrasi mencerminkan sejauh mana individu memahami hak dan kewajiban politiknya serta berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Rendahnya kesadaran ini dapat membuka ruang bagi praktik otoritarianisme dan pelemahan institusi demokratis. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen bangsa untuk terus meningkatkan kesadaran demokrasi melalui pendidikan politik, penguatan transparasi pemerintah, pemberdayaan media, serta pembiasaan budaya dialog dan toleransi. Selain itu, berbagai faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial-ekonomi, pendidikan politik dan kebebasan berekspresi sangat mempengaruhi kesadaran demokrasi. Untuk itu, pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan diperlakukan agar demokrasi di Indonesia dapat tumbuh kuat dan berkelanjutan demi menciptakan masyarakat yang adil, partisipatif dan sejahtera.

Saran

Kesadaran demokrasi ini penting dalam sistem pemerintahan demokratis, dan jika kita sudah sadar bahwa demokrasi itu penting maka Masyarakat dapat menciptakan pemerintahan yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab. Masyarakat juga memiliki kebebasan kebebasan berpendapat tanpa takut pembatasan dan menjamin kebebasan

individu dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa pemerintahan berdasarkan hukum yang ada.

Daftar Pustaka

- Aribowo. (2007, Mei 28). Demokrasi dan budaya politik lokal. Makalah Seminat, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Noor, F. (2020). Demokrasi dan oligarki. Biblosmia Karya Indonesia.
- Rohmatillah, A. R., Sa'diyin, M., & Zaini, A. A. (2023). Tantangan dan prospek: Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia. JOSH: Journal of Sharia, 2(2), 90–100.
- Trisno, B., Aprillia, O., Latifah, O., Safira, D., & Putri, T. A. (2024). Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora, 3(2), 195–208.
- Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CVRtujuh Media Printing.
- Nabila, P. A., NST, P. I., Intan, S., Fatimah, S., & Trisno, B. (2024). Konsep dan urgensi demokrasi Pancasila. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(3), 134–142.
- Arief, M. (2008). Pengembangan kesadaran demokrasi dalam organisasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 14(70), 345–356.
- Nugraheni, S. D., Angel, V., Puspita, V. H., Santi, W. N., & Fitriono, R. A. (2023). Pancasila as an ethical system. JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 1(2), 196–200. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i2.126>
- Soleh, A. K. (2005). Islam dan demokrasi. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Retrieved from <https://repository.uin-malang.ac.id/15166/>
- Slamet, S. (2009). E-Demokrasi di Indonesia: Antara peluang dan tantangan. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Retrieved from <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/3/10741.pdf>
- Sukadi, I. (2021). Islam and Democracy. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Retrieved from <https://repository.uin-malang.ac.id/8210/1/8210.pdf>